UNIVERSITAS GADJAH MADA
Tanggung Jawab KPKNL Atas Hilangnya Minuta Risalah Lelang Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Perkara Perdata
TEGAR OKTAVIYAN Z, Dr. Sutanto, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program. Pascasarjana FHUI. Jakarta.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata.* Cetakan ke-1. Kencana. Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garafindo Persada. Jakarta.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss. Jakarta.

Djojodirjo, M. A. Moegni. 1992. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Pradnya Paramita. Jakarta.

Effendie, Bahtiar. Masdari Tasmin. dan A.Chodari. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ervianto, Wulfram I. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Yogyakarta.

Fakhriah, Efa Laela. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 PT Alumni. Bandung.

Faudi, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer*). Cet. II. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1994. *Ruang Lingkup Permasalah Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia. Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Tanggung Jawab KPKNL Atas Hilangnya Minuta Risalah Lelang Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Perkara Perdata
TEGAR OKTAVIYAN Z, Dr. Sutanto, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta

M.Chief. 2000. *Black's Law Dictionary*. St. Paul. Minnesota: West Group.

Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari, 2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Jakarta.

Mantayborbir, S. dan V.J. Mantayborbir. 2006. *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*. Pustaka Bangsa Press. Medan.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi enam. Liberty. Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet. V. Sumur Bandung. Bandung.

Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.* Buku I.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sianturi, Purnama Tioria. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tainjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPerdata *(Burgelijk Wetboek),* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Undang-undang Lelang (*Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3).

Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*, *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1930:85).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Tanggung Jawab KPKNL Atas Hilangnya Minuta Risalah Lelang Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Perkara Perdata
TEGAR OKTAVIYAN Z, Dr. Sutanto, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang kelas II.

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

ARTIKEL, JURNAL, DAN TESIS

Hermina Br. S. 2007. *Kekuatan Pembuktian Hasil Scan Akta Dimana Minuta dan Salinan Akta Telah Musnah*. Tesis Program Magister Kenotarianan Universitas Indonesia. Depok.

Muchtar, Helitha Novianty, et al., 2018. *Penerapan Prinsip Yurisdiksi In Rem (Forum Rei Sitae) Dalam Gugatan Orang Terkenal Terhadap Cybersquatter Di Indonesia.* Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional. Bandung.

Pambudi, Eko Setyo. 2017. *Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun).* Jurnal Repertorium Vol. IV No. 2 Juli-Desember 2017.